

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara organisatoris, madrasah telah didirikan oleh banyak organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, al Irsyad, Mathla'ul Anwar, Perhimpunan Umat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdhatul Ulama', Jami'atul Washliyah, Jami'atul Khair, dan sebagainya. Dan madrasah telah begitu besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mensukseskan pendidikan 9 tahun dan memajukan pendidikan (Departemen Agama RI 2006 : 2) lebih lanjut diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa belajar disekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Maka berkat usaha keras para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah telah dapat meningkatkan mutu pendidikan, sehingga status madrasah telah disamakan dengan sekolah umum, yaitu SD dengan MI, MTs dengan SMP, MA dengan SMA melalui keputusan bersama (SKB) 3 Menteri yaitu ; Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, No. 037NI 1975 dan No. 36 tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975. disamping itu ditetapkan juga bahwa Ijazah Madrasah mempunyai nilai yang sama dengan sekolah

umum yang sederajat. Akan tetapi mestinya kita tidak hanya puas dengan adanya persamaan derajat Madrasah dengan sekolah umum akan tetapi yang terpenting adalah kemampuan Madrasah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, mutu dalam proses layanan pendidikan dan mutu dalam prestasi akademik dan non akademik sehingga diharapkan siswa lulusan Madrasah memiliki daya saing yang sejajar dengan siswa lulusan dari sekolah umum yang lain.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, melengkapi pengadaan buku-buku perpustakaan dan alat pelajaran lainnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta perbaikan manajemen sekolah. Namun demikian indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Secara umum manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. (Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 : 3).

Otonomi adalah sebuah kemandirian, dengan kemandirian itu diharapkan sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja akan lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, disamping itu sekolah juga dapat lebih optimal dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, karena sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi lembaganya. Implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah merupakan harapan bagi sekolah/madrasah untuk memperbaiki mutu pendidikan dan diharapkan sekolah atau madrasah benar-benar memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan mutu pendidikan. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional menyebutkan salah satu tujuan pembinaan sekolah, mulai dari pra sekolah sampai sekolah menengah adalah terselenggaranya manajemen yang berbasis sekolah dan masyarakat (*school/community based education*) sehingga manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) akan menjadi sebuah pola pembinaan sekolah secara nasional dimasa depan. Paling tidak ada tiga factor yang secara langsung dapat mempengaruhi pendidikan, sehingga pendidikan

di Indonesia menjadi tidak berhasil. (Depdiknas 2001) tiga **factor** dimaksud antara lain adalah :

1. Strategi pembangunan pendidikan di Indonesia selama ini bersifat *input oriented*, dengan pengertian bahwa kebijakan pemerintah dibidang pendidikan selama ini masih bersandar pemenuhan kebutuhan sekolah yaitu apabila semua kebutuhan sekolah seperti pelatihan guru, pengadaan buku-buku perpustakaan, alat-alat kebutuhan sekolah, sarana prasarana dan input lainnya terpenuhi maka output akan menjadi baik. Tetapi ternyata strategi input output yang dikenalkan oleh teori education production fungtion tidak berfungsi seluruhnya dilembaga kependidikan, dan kemungkinan hanya akan terjadi dalam institusi ekonomi dan industri (M. Yusuf R 2003 : 3)
2. Pengelolaan pendidikan di Indonesia selama ini bersifat *Macro Oriented*, (Birokrasi sentralistik) yaitu bahwa kebijakan pendidikan selama ini masih diatur oleh jajaran birokrasi pusat, bahkan setelah otonomi, masih juga diatur oleh birokrasi ditingkat Propinsi dan atau Kabupaten /Kota. Akibatnya kebijakan-kebijakan masih banyak diproyeksikan ditingkat macro (Pusat) sehingga tidak berjalan ditingkat mikro yaitu pada sekolah-sekolah

3. Peran masyarakat atau orang tua siswa masih sangat minim, selama ini pola pembangunan dan system pendidikan nasional telah menunjukkan terciptanya system yang menjauhkan antara lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat, dimana bahwa masyarakat sekarang ini telah terbangun sebuah opini yang kuat, tentang persepsi bahwa pembangunan pendidikan pada lembaga sekolah adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya ditangan pemerintah, sehingga masyarakat secara langsung tidak terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring atau evaluasi dan lain sebagainya. Disamping itu sekolah juga seolah-olah tidak punya beban terhadap hasil-hasil pendidikan yang mestinya pertanggung jawabannya dilaporkan kepada pemerintah, orang tua dan masyarakat. Maka seiring dengan reformasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dimana pelaksanaan MPMBS kiranya dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing lembaga pendidikan karena MPMBS diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap peningkata mutu pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian yang relevan oleh Siti Irene Astuti dan Ishartiwi (2001) penelitian tentang pemahaman dan kesiapan terhadap pelaksanaan MPMBS dikatakan bahwa ; (1) Pemahaman Kepala SD, SMP dan SMU tentang otonomi dan manfaatnya MPMBS cukup, (2) Pemahaman

dan school review tentang otonomi dan manfaatnya MPMBS cukup, (3) Studi tersebut menggambarkan walau sudah dilakukan tapi belum sepenuhnya diterapkan dengan mudah untuk semua sekolah dari semua tingkatan, (4) Pemahaman Kepala SD, SMP dan SMU dalam quality control SD sebesar 42,10 %, SLTP 77,22 % dan SMU 53,85 % telah siap dan telah dilakukan, “dalam M Yusuf R (2003)”.

Merujuk uraian diatas maka masalah ini menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh, oleh karena penulis ingin mengetahui sejauhmana Kesiapan Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Piyungan, mengingat Madrasah ini memiliki kemampuan dan sangat berpotensi untuk dilakukan perubahan kearah yang lebih baik, disamping itu Madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin terjadi, Madrasah juga lebih mengetahui kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki sehingga Madrasah dapat lebih berperan baik dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya dan paling tidak untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sehingga peran sekolah dalam tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan akan terlaksana secara baik.

Sebagai perbandingan penulis juga melakukan penelitian dengan sekolah lain yang sederajat yaitu SMP Muhammadiyah

Banguntapan Bantul. Mengapa penulis memilih SMP Muhammadiyah Banguntapan, karena SMP tersebut letaknya tidak terlalu jauh dengan MTs. Negeri Piyungan tepatnya di Dusun Wiyoro Lor Baturetno RT 04 Baturetno Banguntapan Bantul, disamping itu SMP Muhammadiyah Banguntapan telah melakukan konsep MPMBS. Hal ini dibuktikan bahwa ternyata SMP Muhammadiyah Banguntapan telah mengajukan Proposal Managemen Peningakatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada tahun 2001/2002. diungkapkan dalam Proposal MPMBS tersebut, bahwa SMP Muhammadiyah Banguntapan berkeinginan adanya peningkatan kualitas (mutu) pendidikan melalui perencanaan yang terarah, intensif, efektif dan efisien. Lebih lanjut diungkapkan perlunya menyusun strategi dalam proses pembelajaran serta berusaha menciptakan unggulan-unggulan baik secara kualitatif maupun kompetitif, disamping strategi yang tepat agar visi, misi dan tujuan khususnya pendidikan Muhammadiyah, dan umumnya persyarikatan Muhammadiyah dapat tercapai.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk mengkaji sejauhmana kesiapan implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Piyungan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan tentang identifikasi masalah yang antara lain :

1. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah merupakan kebijakan pemerintah yang harus dillaksanakan oleh setiap institusi sekolah/madrasah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah
2. Belum banyak sekolah yang telah siap untuk melaksanakan kebijakan pemerintah berkait dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
3. Kesiapan sekolah di MTs. Negeri Piyungan tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) masih belum diketahui
4. Sumber daya pendidikan untuk mendukung terlaksananya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) secara umum masih belum memadai
5. Partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan secara umum masih sangat rendah
6. Iklim kerja sama dan keterbukaan antar warga sekolah masih sangat rendah

7. Banyak sekolah dalam penyusunan rencana strategi peningkatan mutu pendidikan masih banyak yang belum melibatkan warga sekolah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya kesiapan kepala sekolah, kesiapan tenaga kependidikan, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, kesiapan manajemen sekolah, kesiapan pendanaan, dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada MTs. Negeri Piyungan Bantul
2. Bagaimana partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
3. Apa yang menjadi kendala dalam kesiapan pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran sejauh mana kesiapan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada MTs. Negeri Piyungan Bantul yang meliputi ;

1. Kesiapan kepala sekolah, kesiapan tenaga kependidikan, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, kesiapan manajemen sekolah, kesiapan pendanaan, kesiapan organisasi pendidikan dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada MTs. Negeri Piyungan Bantul
2. Kesiapan orang tua siswa dan masyarakat dalam partisipasinya pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
3. Serta untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada suatu institusi pendidikan sebagai langkah awal dalam peningkatan mutu pendidikan Madrasah di Indonesia
2. Sebagai landasan bagi Peningkatan Manajemen Mutu Berbasis Sekolah pada MTs. Negeri Piyungan dalam rangka meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya

E. Tinjauan pustaka

Sementara itu penulis baru menemukan literature yang terkait dengan penelitian ini yaitu ;

1. Penulisan tesis tentang Implementasi system manajemen mutu oleh Andi Jusniar tahun 2005 dimana hasil penelitiannya dikemukakan bahwa didalam peningkatan mutu antara lain adanya komitmen menejemen dalam penentuan kebijakan, perencanaan dan tanggung jawab bersama terkait dengan penetapan visi dan misi, menciptakan lingkungan yang kondusif serta memberikan dorongan kepada semua unsure untuk lebih berperan secara efektif dan efisien.

2. Tesis tentang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah oleh M Yusuf R tahun 2003, dikatakan bahwa MPMBS bukan proses sekali jadi dan bagus hasilnya akan tetapi sebuah proses dan proses panjang dan melibatkan banyak orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

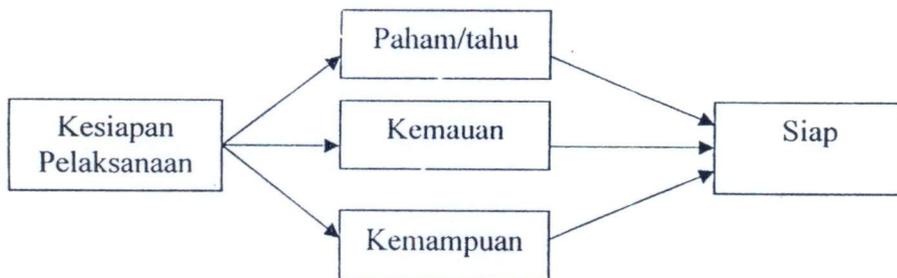
Perbedaanya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini akan mengungkap tentang sejauhmana Kesiapan Pelaksanaan Manejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Piyungan Bantul, yaitu akan melihat tentang berbagai kesiapan yang telah dilakukan seperti upaya kesiapan Kepala Madrasah, kesiapan tenaga kependidikan, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, kesiapan manajemen sekolah, kesiapan pendanaan, kesiapan organisasi. Semua itu berkait dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada MTs. Negeri Piyungan Bantul. Karena institusi pendidikan ini dipandang lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, lebih mengetahui kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki sehingga sekolah dapat lebih berperan baik dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sehingga peran sekolah dalam tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan akan terlaksana secara baik. mengingat madrasah ini memiliki kemampuan dan sangat berpotensi untuk

dilakukan perubahan kearah yang lebih baik, disamping itu madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin terjadi, madrasah juga lebih mengetahui kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki sehingga madrasah dapat lebih berperan baik dalam pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya dan paling tidak untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sehingga peran sekolah dalam tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan akan terlaksana secara baik.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah konsepsi dasar kebijakan pemerintah yang masih sulit untuk dilaksanakan oleh institusi pendidikan, disamping itu Pemerintah yang masih melakukan berbagai akses kebijakan berkait dengan penataan setelah otonomi daerah digulirkan. Sehubungan dengan hal itu maka konsepsi MPMBS itu sendiri berarti masih dalam tarap pencarian bentuk, oleh karena itu penelitian ini difokuskan tentang Kesiapan Implementasi MPMBS pada MTs. Negeri Piyungan, dimana melalui penulisan ini akan dapat dilihat seberapa kesiapan-kesiapan dalam pelaksanaan MPMBS dimaksud baik melalui pemahaman, kemauan dan kemampuan untuk menerapkan

MPMBS sebagai konsep dasar manajemen pendidikan di madrasah yang baru. Berikut gambar ; Kerangka pikir



Dari gambar kerangka berpikir tersebut diatas maka secara teoritis bahwa kesiapan sekolah untuk melaksanakan MPMBS dapat dipahami bahwa apabila warga atau komunitas sekolah paham/tau tentang MPMBS, ada kemauan dan ada kemampuan maka sekolah itu siap untuk melaksanakan MPMBS. Dengan demikian penelitian ini hanya akan memotret Kesiapan Implementasi MPMBS pada MTs. Negeri Piyungan belum sampai mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan MPMBS tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : (1) Bab Pendahuluan, dalam bab ini akan dipaparkan sebuah tema besar tentang pokok permasalahan yang selama ini dihadapi bangsa yakni kegagalan bidang pendidikan khususnya di Indonesia, dimana pendidikan merupakan *factor* penting dalam meningkatkan

kualitas bangsa, kebijakan pemerintah berkait otonomi daerah adalah merupakan salah satu alternatif kebijakan pemerintah untuk kebangkitan daerah dalam membangun bangsa. Sejalan dengan otonomi daerah tersebut pendidikan merupakan sector utama yang akan menjadi akses kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu sekolah di tuntut untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Mutu Pendidikan itu adalah bagaimana upaya sekolah melakukan peningkatan mutu melalui MPMBS-nya. Tujuannya bahwa MPMBS akan menjadi alat pembinaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu dengan merujuk hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para pendahulu penulisan ini akan melengkapi dan menambah wawasan berkait dengan kesiapan implementasi MPMBS yang tujuannya diharapkan melalui penelitian ini berbagai hal yang berkait dengan kesiapan pelaksanaan MPMBS khususnya di MTs. Negeri Piyungan dapat diketahui, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk kepentingan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pelaksanaan MPMBS pada lembaga persekolahan dan juga membuka kepentingan seluas-luasnya bagi para peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut. (2) dalam Bab Selanjutnya akan memaparkan Teori-Teori yang menjadi landasan pemikiran berkait dengan penulisan tesis sebagaimana dijelaskan dalam Bab sebelumnya, landasan teori itu akan dijadikan alat rujukan didalam memecahkan

persoalan-persoalan yang muncul dalam penulisan tesis tersebut. Dengan harapan penulis tidak akan mengalami kesulitan dan hambatan yang berarti. (3) Bab yang lain adalah Metodeologi Penelitian, didalam bab ini akan dipaparkan berbagai macam cara atau metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain menyangkut jenis penelitian, waktu penelitian, alat yang digunakan dalam penelitian, cara pengumpulan data dan tehnik analisis data. Sehingga apa yang menjadi persoalan akan dapat dipecahkan secara jelas dan tidak akan menimbulkan persepsi yang salah. (4) Bab yang selanjutnya adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana dalam bab ini akan memaparkan data-data hasil penelitian dilapangan yang telah dikumpulkan dengan berbagai cara sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Dimana data-data tersebut akan diungkap secara nyata dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Setelah itu dalam bab ini akan disajikan pula pembahasan-pembahasan dengan menggunakan alat dan tehnik analisa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sehingga melalui bab ini diharapkan data penelitian dan hasil pembahasan akan dapat dipahami secara jelas, sehingga apa yang menjadi pokok permasalahan yang telah diungkapkan melalui bab sebelumnya akan nampak jawabannya. (5) Bab yang terakhir adalah Penutup, dimana dalam bab ini akan menyajikan uraian kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diungkapkan melalui bab sebelumnya. Sehingga hasil analisis

dalam penelitian ini akan nampak secara jelas. Selain itu akan disajikan pula beberapa saran yang bermanfaat berkait hasil penelitian yang dilakukan penulis sehingga dapat dipahami bagaimana upaya pemecahan masalah yang muncul di lapangan